



Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok Tahun 2023

Arastika Nanda¹, Rahmadani Yusran*²

^{1,2} Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

^{1*} yusranrdy@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received 15th February 2024

Revised 3th March 2024

Accepted 30th March 2024

Keywords:

Analisis Kebijakan,
Stunting,
Kabupaten Solok

ABSTRACT

This research investigates the implementation of stunting reduction policies in Solok Regency. The findings reveal that the local government has initiated several programs aimed at improving food consumption patterns, raising nutritional awareness, enhancing the quality of nutrition and services, and strengthening the food and nutrition monitoring system. A qualitative research method with a descriptive approach was employed to analyze and interpret public policy information. The study's informants included representatives from regional apparatus organizations (OPD), the Task Force for Accelerating Stunting Reduction, the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPKBP3A), the Community Empowerment and Village Service, and the Stunting Reduction Acceleration Team. The research identifies key challenges in the implementation process, such as inadequate facilities and infrastructure, low remuneration for health workers, a shortage of human resources, and limited budget allocations. To ensure the program's effectiveness, the local government should establish both long-term and short-term strategies.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:
Rahmadani Yusran
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Padang
yusranrdy@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan yang dijumpai pada tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya gizi dalam jangka panjang. Gejala dari stunting ialah tinggi anak yang tidak mencapai standar dan infeksi yang berulang. Pemerintah Daerah gencar melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting, termasuk dengan menerapkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Pemerintah pusat kemudian memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil dalam menunjukkan penurunan angka stunting yang signifikan. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperlihatkan angka prevalensi stunting yang mengalami penurunan substansial. Pada tahun 2021 berada di angka 40,1% sedangkan pada tahun 2022 memperoleh angka 24,2% (Survei Status Gizi Indonesia, 2022).

Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam perbaikan gizi anak-anak di wilayah tersebut, namun terdapat kritik bahwa fokus utama pemerintah daerah hanya terletak pada penurunan angka *surveilans* stunting, tanpa melakukan langkah-langkah komprehensif pencegahan. Hal ini dikhawatirkan hanya berdampak pada manipulasi data dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. World Health Organization (WHO) telah menetapkan standar angka stunting yang dianggap sehat yaitu kurang dari 20 persen. Kabupaten Solok masih memiliki jarak yang signifikan untuk mencapai standar WHO ini.

Adanya jarak dalam pencapaian standar ini disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki konsistensi dalam pencegahan penurunan stunting serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi. Beberapa peraturan terkait stunting di Indonesia tercakup dalam: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mengenai laju penurunan stunting, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1595/Sj/2018 mengenai intervensi penurunan stunting terintegrasi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 220-380-2020 tentang Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting, dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 mengenai penurunan stunting.

Beberapa penelitian sebelumnya melihat implementasi kebijakan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik oleh BKKBN serta ibu dan calon pengantin dibekali dengan pengetahuan cukup tentang gizi dan kehamilan (Annisa, 2021; Aryastami, 2017). Selain itu, pemahaman masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat melalui 5 pilar juga dapat dilakukan untuk menurunkan stunting (Azzahra, 2022). Pelaksanaan peningkatan mutu dan keamanan pangan yang berdampak pada peningkatan gizi masyarakat juga dapat dilakukan (Risfa, 2021). Penelitian lainnya yang dilakukan (Harmein, K., & Yusran, R, 2023) mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok masih mengalami masalah dalam membuat inovasi pencapaian penurunan stunting. Hal ini disebabkan karena pelibatan dan koordinasi antar instansi serta keterbatasan anggaran (Gusdiva, N., 2023).

Artikel ini menjelaskan capaian target kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dan menganalisis berbagai aspek terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan status gizi individu dan keluarganya yang dapat berdampak kepada kehidupan generasi emas Indonesia di tahun 2045 (Shobib, 2024).

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menafsirkan informasi dalam analisis kebijakan publik (Dunn, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dan penelusuran dokumen yang relevan. Informan penelitian ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdiri dari: kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Bapelitbang, kepala bidang kesehatan masyarakat dinas kesehatan, bidang Satgas Percepatan Penurunan Stunting Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Pengujian validitas data menerapkan metode triangulasi sumber dengan teknik reduksi sebagai analisis data, lalu data disajikan dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang menerangkan terkait penurunan stunting di Kabupaten Solok dilaksanakan berdasarkan Perbup nomor 35 Tahun 2019. Pelaksanaan kebijakan penurunan stunting menggunakan pendekatan yang difokuskan kepada keluarga yang berisiko stunting. Kabupaten Solok sendiri mempunyai 74 Nagari yang setiap wilayah mempunyai penyebab stunting yang beragam. Sinergi dengan berbagai pihak sangatlah esensial untuk keberhasilan program, baik pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi masyarakat setempat dalam penguatan penurunan angka stunting. Kerjasama ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan upaya bersama dalam mengatasi permasalahan stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa usaha yang dilakukan adalah:

Pertama, perbaikan pola konsumsi makanan dengan fokus pada edukasi gizi dan pola asuh anak melalui pendidikan kepada orang tua. Program-program ini mencakup penyuluhan di posyandu dan puskesmas yang secara langsung melibatkan ibu-ibu dan balita serta kerjasama dengan sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum. Hal ini juga sejalan dengan penelitian di wilayah lain yang juga melibatkan Posyandu dalam penurunan stunting (Hera, 2023). Selanjutnya melalui program kampanye komunikasi publik menuju "*zero stunting*" oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan kerjasama multisektoral seperti: dinas kesehatan, pertanian, pendidikan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Namun demikian, pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Solok belum tercapai, hal ini disebabkan dominasi makanan cepat saji dalam pemberian pola makanan kepada anak-anak.

Perbaikan pola konsumsi makanan yang sehat dan beragam memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memastikan ketahanan pangan. Fokus yang lebih besar pada peningkatan kualitas pola makan harus dilakukan di Kabupaten Solok. Perbedaan asupan kalori per kapita di berbagai kelompok masyarakat menjadikan program ini kurang sukses. Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi terkadang tidak menjamin anaknya bebas dari stunting. Pola konsumsi makanan masyarakat masih didominasi makanan siap saji yang diberikan oleh orang tua. Inilah, pentingnya meningkatkan kolaborasi diantara berbagai lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang.

Kedua, menerapkan inisiatif pemantauan berat badan secara teratur, mengikuti pemberian ASI eksklusif dalam enam bulan awal kehidupan bayi dan mengikuti asupan suplemen makanan yang direkomendasikan. Kabupaten Solok dihadapkan dengan tantangan signifikan dalam meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengadvokasi praktik gaya hidup sehat dalam menghadapi masalah stunting. Terlepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat stunting sejak 2019, telah terjadi fluktuasi prevalensi stunting. Kesadaran yang tidak memadai mengenai nutrisi yang tepat dan praktik kebersihan yang kurang optimal diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap masalah stunting, seperti yang selalu ditekankan pemerintah daerah pada tahun 2023.

Upaya sosialisasi dan kampanye advokasi publik melibatkan lembaga kesehatan seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, fasilitas kesehatan dan keterlibatan aktif ibu PKK. Para stakeholders ini dapat menyebarkan informasi dan memperkuat pelaksanaan skema gizi di Kabupaten Solok. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman individu tentang nutrisi yang sehat tetapi juga mendorong modifikasi perilaku yang bertahan lama untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Namun, kegiatan penimbangan berat badan secara teratur ini mengalami kendala dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana di tiap-tiap nagari. Hal ini berakibat kepada perolehan data kesehatan yang akurat. Banyak nagari yang masih mengandalkan timbangan kain alih-alih timbangan digital yang menyebabkan hasil penimbangan tidak terlalu akurat. Demikian juga dalam pemberian ASI eksklusif, kader yang bekerja belum terfasilitasi dengan baik. Kader kesehatan memperoleh honor yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan beban pekerjaannya. Kader kesehatan hanya menerima gaji sebesar 300.000 rupiah per bulan. Honor yang rendah ini tidak sebanding dengan komitmen dan waktu yang mereka dedikasikan. Sehingga motivasi kader untuk memberikan edukasi yang optimal menjadi berkurang. Proses implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan konsep (Van Meter & Van Horn, 1975) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia maupun sumberdaya material harus dapat mendukung kebijakan yang ada.



Gambar 1. Pendataan Balita oleh Kader Kesehatan

Permasalahan stunting juga berhubungan dengan gizi remaja dalam jangka panjangnya. Kabupaten Solok memberikan suplemen dan pemeriksaan hemoglobin (Hb), khususnya bagi remaja putri di sekolah. Hal ini dilakukan untuk memantau kesehatan mereka secara konsisten. Adanya dukungan dari instansi seperti Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Puskesmas, serta ibu-ibu PKK dapat mempermudah pencapaian target kebijakan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga terkadang terdapat konflik kepentingan. Setiap dinas memiliki program dan prioritasnya sendiri, sehingga koordinasi dan sinergi antar program menjadi minim. Padahal, pada saat penerapan kebijakan harus dimulai dengan menjalin hubungan yang baik antar instansi yang terkait (Van Meter & Van Horn, 1975).

Ketiga, penggunaan metode antropometri untuk mengukur stunting sehingga memudahkan perancangan intervensi gizi yang tepat. Selain itu, penggunaan website New SIGA untuk menginput data keluarga berisiko stunting juga dilakukan oleh Dinas Kabupaten Solok. Penggunaan teknologi tersebut melibatkan dinas kesehatan beserta jajaran perangkatnya. Namun demikian, peningkatan mutu dan layanan gizi yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sesuai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena kekurangan tenaga ahli dalam melakukan penginputan data. Padahal, data memiliki peran dalam pelaksanaan penurunan stunting dan memudahkan monitoring dan evaluasi program.

Keempat, mengidentifikasi keluarga-keluarga yang berisiko stunting mendapat bantuan program ketahanan pangan. Program ini mencakup pembagian makanan bergizi seperti ikan. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan dengan menanam tanaman di pekarangan rumah juga diharapkan dapat mengurangi stunting (Wardani, 2023). Melalui program ini, keluarga yang berisiko stunting diberikan bantuan bibit tanaman dan ikan lele. Di wilayah lain, juga terdapat program serupa seperti pemberian telur sebagai pangan hewan kepada balita stunting. Program ini cukup berhasil karena terdapat penurunan persentase stunting balita sebesar 11,5% (Farras, 2022). Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan sumber pangan yang beragam dan berkualitas. Selanjutnya mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap masalah gizi untuk menyusun strategi intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah tersebut. Implementasi program tetap menghadapi rintangan, terutama keterbatasan sumber daya finansial maupun SDM.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Solok menitikberatkan pada pembenahan pola konsumsi makanan, peningkatan pemahaman pentingnya gizi, kualitas dan layanan gizi yang relevan dengan perkembangan teknologi serta penguatan kewaspadaan pangan. Namun demikian kebijakan penurunan stunting belum dilaksanakan secara maksimal dan belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut dikarenakan terdapat perbedaan asupan kalori per kapita di berbagai kelompok pendapatan dan akses yang tidak setara terhadap makanan bergizi. Hal lainnya adalah tingkat kesadaran yang tidak memadai mengenai nutrisi yang tepat dan buruknya pengelolaan data balita stunting. Selain itu, di Kabupaten Solok, juga seperti di daerah lainnya di Indonesia juga mengalami kekurangan sarana serta anggaran yang menghalangi pencapaian target. Sehingga, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah perlu berbenah dan mengatur strategi jangka panjang dan pendek sehingga program dapat berdampak signifikan pada penurunan stunting dan target yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Annisa, K. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*. Retrieved from <http://pgde.ppj.unp.ac.id/index.php/pgde/article/view/33>
- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233-240.
- Azzahra, J. (2021). Implementasi 5 Pilar Penurunan Stunting Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*. Retrieved from <http://pgde.ppj.unp.ac.id/index.php/pgde/article/view/32>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Taylor and Francis Group
- Farras, R. M., & Yusnita, Y. (2022). Program One Day One Egg sebagai Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 389-395.
- Gusdiva, N., Koeswara, H., & Putera, R. E. Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok. *GEMA PUBLICA*, 9(1), 32-49.
- Harmein, K., & Yusran, R. (2023). Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 3808-3814.
- Hera, A. G. M., Simanjorang, C., Angelina, G., Fitriani, M. A., Apriningsih, A., & Wasir, R. (2023). Efektivitas Posyandu Dalam Penanganan Dan Pencegahan Stunting: A Literature Review. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 258-269.
- Shobib, A., Achyar, A., Bange, D. S., Dewantoko, T. A., Jaelani, A., Widianingrum, N., ... & Haryanto, A. (2024). Peran Aktif Akademik dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Stunting, Membangun Generasi Emas 2045 di Kelurahan Ngadirgo, Kec. Mijen Kota Semarang. *Palawa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-5.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trihono, Atmarita, dkk (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & society*, 6(4), 445-488.
- Wardani, N. E. K., & Sholikah, S. M. A. (2023). Analisis Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) terhadap Upaya Penurunan Stunting. Penerbit NEM.

Berita Online

Kementerian Kesehatan Rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022
<https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian-kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022>

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting.
Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129538/perbup-kab-solok-no-35-tahun-2019>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>